

**PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP
PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

Yufenti Oktafia
Universitas Kanjuruhan Malang
Email: oktaviayventy@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan dimoderasi oleh corporate governance. Dewan direksi, komisaris independen dan komite audit adalah proksi dari corporate governance. Pengujian dilakukan pada 45 perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa komite audit dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari managerial entrenchment strategy bagi perilaku opportunistik manajemen untuk mendapat dukungan dari stakeholders. Keberadaan dan perluasan peran komite audit yang terkait pada tindakan corporate berperan penting untuk menjamin akuntabilitas dari strategi dan implementasi tanggung jawab sosial.

KataKunci: Manajemen Laba, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Corporate Governance

ABSTRACT

This study examined the effect of earnings management on the disclosure of corporate social responsibility to be moderated by corporate governance. Board of directors, independent directors and audit committees are proxies of corporate governance. Tests were conducted at 45 companies listed in the index 100 compass that does social responsibility disclosure.

These results indicate that earnings management significantly positive effect on social responsibility disclosure and this study may provide evidence that audit committees may moderate the relationship between earnings management and social responsibility disclosure. Firm size as control variable also has a positive effect on the disclosure of corporate social responsibility. The findings of this study indicate that corporate social responsibility is part of the managerial entrenchment



Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Humanika
JINAH
Volume 2
Nomor 2
Singaraja, Juni 2013
ISSN 2089-3310

strategy for opportunistic behavior management for the support of stakeholders. The existence and expansion of the role of audit committees related to corporate actions play an important role to ensure the accountability of the strategy and implementation of social responsibility.

Keywords: Earnings Management, Disclosure of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance

I. PENDAHULUAN

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi *trend* global seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan *stakeholders*. Kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan pasar, perusahaan harus secara serius dan terbuka memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial. Saat ini tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi sehingga setiap perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*. Elkington (1994) mengemukakan konsep tanggung jawab sosial dalam fokus *triple bottom line*, yang mempersatukan kaidah ekonomi, sosial dan lingkungan dalam satu pemahaman yang terintegrasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (profit), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan (planet) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). *Triple bottom line* dapat disimpulkan bahwa “profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “planet” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*people*” sebagai aspek sosial.

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk dapat memenuhi kepentingan *stakeholders* dan menjamin keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Pengungkapan informasi perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk mempengaruhi persepsi prospek keuangan perusahaan di masa depan oleh pihak eksternal terutama *stakeholder*, seperti analis saham, pelaku pasar modal, dan investor institusional (Brammer dan Pavelin, 2006). Pengungkapan tanggung jawab sosial berkaitan dengan isu etika dan moral yang memusatkan pada pembuatan keputusan dan perilaku dalam perusahaan, seperti perlindungan lingkungan, manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan dengan penduduk lokal, serta hubungan dengan pelanggan dan pemasok (Castello dan Lima, 2006).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, memposisikan manajer menghadapi *conflict of interest* untuk memaksimalkan *shareholders* dan *stakeholders* lainnya yang mempunyai kepentingan berbeda dan juga kepentingannya sendiri terkait kompensasi

manajemen yang didasarkan pada laba. Kenyataannya, informasi mengenai sistem kompensasi manajemen sangat jarang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga menyulitkan *stakeholders* untuk mengetahui apakah besarnya kompensasi manajemen didasarkan pada kinerja tanggung jawab sosial. Tidak adanya kriteria sebagai dasar bagi pengukuran kinerja menyebabkan manajer tidak dapat dievaluasi, sehingga memungkinkan manajer untuk menyelewengkan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dengan mengobarkan tuntutan keuangan dan kepentingan masyarakat luas (Chih *et al.*, 2008).

Manajemen laba merupakan topik yang menarik, baik di bidang riset akuntansi dan praktisi. Secara khusus, Gudan Lee (2008) manajemen telah meluas dan merasuk di setiap pelaporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan. Ia memberikan suatu bukti bahwa *earnings management* terjadi di setiap laporan keuangan kuartalan, dan tingkat *earnings management* terbesar ditemukan pada kuartal keempat. Manajemen laba tidak hanya mempengaruhi pemilik perusahaan tetapi juga berpengaruh pada *stakeholders* lainnya. Manajemen laba dapat menyesatkan *stakeholders* mengenai nilai aset, transaksi, atau posisi keuangan perusahaan, dan hal ini mempunyai konsekuensi negatif bagi pemegang saham, lingkungan di mana perusahaan berada, kreditor, karyawan, reputasi dan keamanan karir manajer serta masyarakat secara keseluruhan (Zahra *et al.*, 2005).

Adanya kewaspadaan yang dilakukan oleh *stakeholders* terhadap praktik manajemen laba, dapat mengancam keamanan posisi manajer dan merusak reputasi perusahaan, menyebabkan manajer mempunyai insentif untuk mengkompensasi *stakeholders* melalui praktik pengungkapan tanggung jawab sosial. Temuan penelitian Chih *et al.*, (2008) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan komitmen tinggi terhadap tanggung jawab sosial melakukan *earning aggressiveness* dengan menunda pengakuan dari kerugian atau mempercepat pengakuan laba. Meskipun perusahaan melaksanakan pengungkapan tanggung jawab sosial tetapi saat manajemen laba dilakukan tentu terlalu jauh karena perilaku oportunistik manajemen, maka laporan keuangan tidak dapat merefleksikan kinerja perusahaan secara akurat dan konsekuensinya akan melemahkan kemampuan *outsiders* untuk mengelola perusahaan (Leuz *et al.*, 2003).

Untuk mencapai tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, perlu adanya keterpaduan antara peran *corporate governance* dengan strategi pengungkapan tanggung jawab sosial. *Corporate governance* biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Wardhani, 2007). *Corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola

perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan mengelola perusahaan. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. Kesadaran mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dapat berdampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan akan mengarahkan kepentingan *board of directors* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. *Corporate governance* tidak akan efektif tanpa dorongan pengungkapan tanggung jawab sosial berkelanjutan, karena perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders* dan juga mampu menghasilkan laba untuk dapat menciptakan nilai bagi pemilik atau pemegang saham (Jamaill *et al.*, 2008).

Masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan dimoderasi oleh *corporate governance*?

II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah salah satu bentuk pengungkapan yang tidak diwajibkan (*voluntary disclosure*) oleh PSAK. Pengungkapan tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dalam bentuk informasi biaya maupun kegiatan lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa besar indeks pengungkapan kandungan informasi mengenai lingkungan perusahaan yang disajikan dalam *annual report*, baik yang berhubungan dengan bahan baku dan jenis energi digunakan (*input process*), proses produksi (*processing*) mulai pemilihan proses produksi, pengaturan tentang kesehatan, keamanan keselamatan karyawan. Secara teoritik, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan

terhadap para *strategic stakeholders*nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.

Sustainability reporting atau pelaporan berkelanjutan telah berkembang dan dipraktikkan secara luas di dunia berpedoman pada *guidelines* yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Inotiations* (GRI). Untuk membuat *sustainability reporting*, pembuat laporan memerlukan pedoman atau standar yang diterima masyarakat secara luas. Untuk mengimplementasi laporan berkelanjutan dengan mengembangkan kriteria yang pada akhirnya akan menjadi standar pelaporan yang diterima secara umum (Ballou *et al.*, 2006). Lebih lanjut dinyatakan Ballou *et al.*, (2006) bahwa GRI menerima dukungan aktif dari sejumlah kelompok bisnis, organisasi dan nirlaba. Pedoman terbaru GRI G3 yang dikeluarkan pada tahun 2006 memuat indikator tenaga ekonomi, lingkungan hidup dan sosial yang mencakup praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, hak asasi, kemasyarakatan, dan tanggung jawab terhadap produk.

Manajemen Laba

Healy dan Wahlen (1998) telah memberikan definisi *earnings management* yang ditinjau dalam kaitannya dengan badan penetap standar, yaitu: *Earnings management* terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Sementara itu, Schipper (1989) mengartikan *earnings management* sebagai “*disclosure management*” dalam pengertian bahwa manajemen melakukan intervensi terhadap proses pelaporan keuangan kepada pihak ekstern dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Scott (2009:403), motivasi perusahaan dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba adalah

1. *Bonus scheme* (program bonus) merupakan motivasi manajer yang bekerja di perusahaan dengan program bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.
2. *Debt covenant* (kontrak hutang jangka panjang) yaitu motivasi yang sejalan dengan hipotesis *debt covenant* dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode

berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

3. *Political motivation* (motivasi politik) yaitu motivasi dari perusahaan-perusahaan besar dan industri strategis yang cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.
4. *Taxation motivation* (motivasi perpajakan), perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.
5. Pergantian *CEO*, *CEO* yang akan habis masa penugasannya atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian pula dengan *CEO* yang kinerjanya kurang baik, ia akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.
6. *Initial Public Offering* (penawaran saham perdana), pada saat perusahaan *go public*, informasi keuangan yang ada dalam prospektus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat dipakai sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan.

Corporate Governance

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) merumuskan *corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan.

Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*. *Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari penerapan *corporate governance* dapat diketahui dari harga saham perusahaan yang bersedia dibayar oleh investor. Terdapat dua jenis mekanisme untuk membantu

menyamakan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (*shareholder*) yaitu mekanisme pengendalian perusahaan internal dan mekanisme pengendalian berdasarkan pasar. Mekanisme pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Kontrak insentif jangka panjang merupakan salah satu pilihan mekanisme internal untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan *shareholder*.

Hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian Aguilera *et al.*, (2006) menganalisis perbedaan pengungkapan CSR antara perusahaan di UK dan US yang menunjukkan perbedaan dalam susunan *corporate governance*, yang direfleksikan dengan peran investor institusional di kedua negara. Penelitian yang menguji hubungan antara pengungkapan sukarela dan komite dilakukan oleh Ho dan Wong (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara keberadaan komite audit dengan pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan. Penelitian Kurihama (2007) menemukan CSR *corporate governance* dan auditing saling berhubungan secara interaktif. Untuk memenuhi CSR dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan, perusahaan harus membangun dan menjalankan *corporate governance*.

Jamail *et al.*, (2008) dalam penelitiannya di Lebanon menemukan bahwa mayoritas manajer memahami *corporate governance* sebagai pilar penting bagi CSR berkelanjutan. Perusahaan tanpa sudut pandang jangka panjang yang efisien terhadap kepemimpinan, mekanisme pengendalian internal yang efektif, dan tanggung jawab kuat yang saling timbal balik dengan *stakeholders* internal tidak dapat menjalankan CSR arti yang sesungguhnya. Sebaliknya, *corporate governance* tidak akan efektif jika tanpa dorongan CSR yang berkelanjutan karena perusahaan merespon kebutuhan *stakeholders* untuk menghasilkan laba dan menciptakan nilai perusahaan bagi pemilik dan *stakeholders* lainnya. Penelitian Ho (2005) bahwa komitmen yang tinggi terhadap CSR berhubungan positif dan kuat dengan tata kelola perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Manajer yang melakukan manajemen laba dengan motivasi pasar modal, kontraktual dan regulasi, kemungkinan akan merasa terancam keamanannya untuk mempertahankan posisinya dalam menjalankan perusahaan. Cara yang memungkinkan bagi manajer untuk melindungi posisinya serta menjaga keuntungan pribadinya adalah dengan mengikat diri

pada aktivitas yang secara luas ditujukan untuk mengembangkan hubungan dengan *stakeholders* perusahaan dan aktivis lingkungan yang disebut pengungkapan tanggung jawab sosial untuk memperoleh dukungan dari kelompok-kelompok tersebut.

Perusahaan dapat memanipulasi informasi yang diberikan kepada *stakeholders*, terutama *stakeholders* penting seperti pemerintah, kreditur, atau kelompok kepentingan sosial dan lingkungan, untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan atau untuk mengalihkan perhatian dari penolakan atau ketidaksetujuan *stakeholders*. Woodward *et al.*, (2001) juga menyatakan bahwa manajer cenderung memanipulasi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk kepentingannya sendiri, maka peran dari pihak independen diperlukan untuk mengaudit pengungkapan tersebut, dan diwajibkan terutama bagi perusahaan yang rentan secara sosial dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dikembangkan hipotesis:

H₁: Manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan yang mempunyai *corporate governance* yang baik akan akomodatif dan meningkatkan kredibilitas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian empiris yang relevan antara *corporate governance* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka penelitian ini menggunakan komposisi komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi sebagai proksi dari *corporate governance*.

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Penelitian hubungan antara ukuran komisaris independen dengan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Sulastini (2007) menemukan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris independen dengan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu penelitian lain juga dilakukan oleh Ujianto dan Pramuka (2007) yang menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba menemukan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{2a}:Komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Dewan Direksi

Wardhani (2006) menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yaitu: meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan & turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan *agency* yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol.

Menurut penelitian Iqbal dan Fachriyah (2007) dewan direksi juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik manajemen laba, semakin banyak jumlah dewan direksi semakin tinggi manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*. Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{2b}:Dewan direksi memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Komite Audit

Komite audit juga dapat menjadi pengawasan yang dapat memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan dan manajer, khususnya dalam laporan keuangan lingkungan di mana keduanya mempunyai tingkat informasi yang berbeda. Keberadaan komite audit sebagai *corporate governance* dapat meningkatkan relevansi dan reliabilitas pengungkapan informasi perusahaan. Sebagai bagian integral dari *corporate governance* komite audit diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan serta pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Selain itu menurut penelitian Iqbal dan Fachriyah (2007)komite audit juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H_{2c}:Komite audit memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

III. METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik di Indonesia menurut indeks Kompas 100. Indeks Kompas adalah merupakan indeks saham dari 100 perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Indeks Kompas 100 secara resmi diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan koran Kompas. Saham-saham terpilih untuk dimasukkan dalam indeks Kompas 100 ini selain memiliki likuiditas tinggi, serta nilai kapasitas pasar yang besar juga merupakan saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja baik. Saham-saham yang termasuk dalam Kompas 100 diperkirakan mewakili sekitar 70-80% dari total 1.582 triliun nilai kapasitas pasar seluruh saham yang tercatat di BEI. Jumlah perusahaan yang tercatat sebanyak 100 perusahaan.

Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100 periode tahun 2008-2009 harian Kompas.
2. Perusahaan publik *non* keuangan yang termasuk dalam indeks Kompas 100 periode tahun 2008-2009 harian Kompas.
3. Perusahaan menyajikan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan laporan berkelanjutan.
4. Variabel-variabel yang diteliti tersedia lengkap dalam laporan tahunan mulai tahun 2008-2009

Tabel Hasil Seleksi Sampel

Keterangan	jumlah
Jumlah perusahaan yang masuk indeks Kompas 100	100
Jenis perusahaan sektor keuangan	(14)
Perusahaan yang tidak tercatat selama 2 tahun pengamatan	(14)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR	(27)
Jumlah perusahaan yang masuk sebagai sampel penelitian	45

Sumber data :diolah dari ICMD dan IDX.Co.id

Berdasarkan hasil seleksi sampel di atas maka penelitian menggunakan 90 pengamatan yang diamati yang berasal dari *pooled* data selama 2 tahun (45x 2 tahun).

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini diproksikan dalam indeks pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini diproksikan dengan indeks pengungkapan CSR (ICSR) berdasarkan *Global Reporting Initiatives* (GRI).

Instrumen pengukuran (CSRI) yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), yang mengelompokkan informasi CSR ke dalam kategori: Lingkungan, Energi, Tenaga Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum. Total *item* pengungkapan tanggung jawab sosial berkisar 78, tergantung dari jenis industri perusahaan. Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap *item* pengungkapan tanggung jawab sosial dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa *et al.*, 2005 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya, skor dari setiap *item* dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Variabel *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan. Untuk rumus perhitungan CSRI adalah sebagai berikut (Haniffa *et al.*, 2005):

$$CSRI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRI_j$: *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan

n_j : jumlah *item* untuk perusahaan j , $n_j \leq 78$

X_{ij} : *dummy variabel*: 1 = jika *item* i diungkapkan; 0 = jika *item* i tidak diungkapkan

Dengan demikian, $0 \leq CSRI_j \leq 1$

Manajemen Laba

Manajemen laba adalah tindakan manajemen untuk menggunakan *judgement* dalam pelaporan keuangan dan dalam prosedur transaksi, dengan tujuan untuk mempengaruhi kontraktual atau menyesatkan pihak *stakeholders* dalam pengambilan keputusan mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Healy dan Wahley, 1999). Penelitian ini menggunakan *Jones Modified Model* (1991), karena ini dianggap paling baik dalam mendeteksi manajemen laba

(Dechow *et al.*, 1995). Model ini dibangun atas asumsi kelemahan pengukuran *discretionary accrual* terhadap pendapatan.

Model ini mengasumsikan semua perubahan dari penjualan kredit pada periode terjadinya akan menghasilkan *earning management*. Hal ini didasari pada alasan lebih mudah memodifikasi laba dengan melakukan *discretionary* melalui pengakuan pendapatan dari penjualan tunai. Jika modifikasi ini berhasil, estimasi *earning management* tidak bias, pada perusahaan yang melakukan modifikasi pendapatan. Dalam model ini dijelaskan bahwa total akrual terdiri dari *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals* (Dechow *et al.*, 1995). Model perhitungannya sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan (2) di atas menjelaskan perbedaan antara model jones dan model *modified jones*, yaitu dengan adanya piutang bersih (ΔREC) yang dimasukkan kedalam persamaan. Menurut Dechow *et al.*, (1995) hal ini disebabkan karena tidak semua *revenue* itu merupakan akrual, yang merupakan akrual hanya yang belum dilunasi saja sedangkan yang sudah dilunasi bukan merupakan akrual. *Error* inilah merupakan akrual diskresionernya.

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta Rev / A_{it-1} - \Delta Rec_t / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1}) \dots \dots (3)$$

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

DA_{it} : *Discretionary accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDA_{it} : *Non discretionary accruals* perusahaan i pada periode ke t

TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode ke t

NI_{it} : Laba bersih perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} : Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada periode ke t

ΔRev_t : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPE_t : Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

ΔRec_t : Perubahan piutang perusahaan pada periode ke t

e : Error

Corporate Governance

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *corporate governance*. Variabel moderasi suatu variabel independen lainnya yang dimasukkan ke dalam model karena mempunyai efek kontigensi dari hubungan variabel dependen dan variabel independen sebelumnya. *Corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan dengan komisaris independen, dewan direksi, komite audit serta variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage*.

Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen. Proporsi dewan komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. Kriteria tentang komisaris independen: (1) Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan. (2) Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu. (3) Komisaris independen bukan merupakan penasihat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut. (4) Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut. (5) Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut. (6) Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuan sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. Proporsi dewan komisaris Independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

Dewan Direksi

Dewan direksi didefinisikan sebagai dewan manajemen yang berfungsi sebagai pengelola dan perwakilan perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris” (FCGI, 2001:4). Dewan direksi merupakan manajemen yang bertanggung jawab mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengawasan dan pengarahan dewan komisaris. Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh dewan komisaris. Perusahaan dengan jumlah dewan direksi 1 sampai 7 orang diperkirakan optimal dalam mengontrol manajemen.

Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Komite audit harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga kualitas laporan keuangan tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit. Semakin besar jumlah komite audit yang ada pada suatu perusahaan maka dapat meningkatkan *corporate governance*. Hasil kerja komite audit direfleksikan dalam suatu laporan komite yang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan dikotomi dengan nilai 1 jika terdapat laporan komite audit dalam laporan perusahaan, dan 0 jika tidak terdapat laporan komite audit dalam laporan tahunan perusahaan.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya lebih baik untuk didapatkan model empiris yang lebih baik dan lebih lengkap. Variabel kontrol ini bukan variabel utama yang akan diteliti dan diuji tetapi lebih ke variabel lain yang mempunyai efek pengaruh. Jika efeknya kecil terhadap hubungan kausal dan jumlah variabel kontrol dapat sangat banyak maka variabel ini diabaikan.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: Total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Mardiyah, 2006:247). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada perusahaan besar dengan total aktiva yang banyak akan lebih berani untuk

menggunakan modal dari pinjaman (hutang) dalam berbelanja seluruh aktiva baik aktiva tetap maupun aktiva lancar yang digunakan untuk perluasan usaha, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil ukurannya. Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *log* total pendapatan.

Leverage

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan hutang (Sutrisno, 2000: 261). Beberapa analisis menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya (Husnan dan Pudjiastuti, 1994:70). Rasio *leverage* memiliki sejumlah implikasi. *Pertama*, para kreditur memandang ekuitas atau dana yang dipasok pemilik, sebagai suatu pelindung atau basis penggunaan hutang. Jika pemilik hanya menyediakan sebagian kecil dari pembiayaan total, resiko perusahaan sebagian besar ditanggung oleh kreditur. *Kedua*, dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat dari memegang kendali atas perusahaan dengan komitmen yang terbatas. *Ketiga*, penggunaan hutang dengan tingkat bunga yang tetap memperbesar baik keuntungan maupun kerugian bagi pemilik. *Keempat*, penggunaan hutang dengan biaya bunga yang tetap dan dengan saat jatuh tempo yang tertentu memperbesar resiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya (Weston dan Copeland, 1995:252). *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan rasio dari total hutang terhadap total aset. Ada beberapa macam *rasio leverage* (hutang) yaitu sebagai berikut:

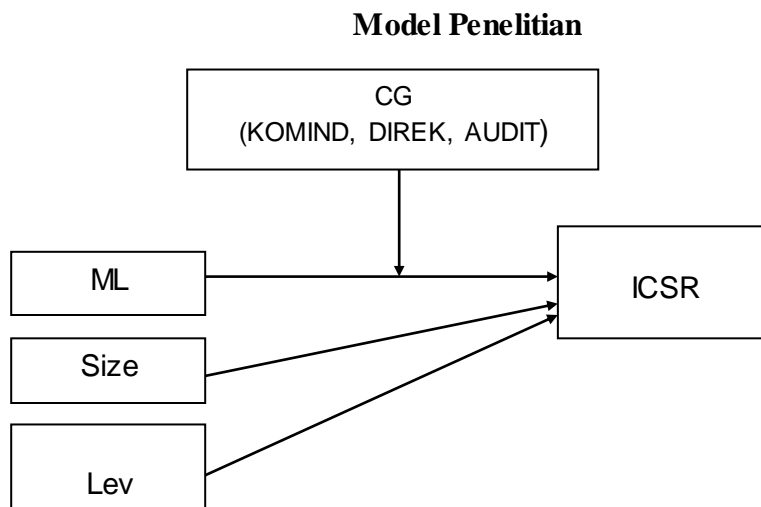
$$Debt Ratio = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Rasio total hutang dengan total aktiva biasa disebut dengan rasio hutang (*debt ratio*) (Sutrisno, 2000:261). *Ratio* ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh kreditur. Semakin tinggi *debt ratio* semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan di dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderate regression analysis* (MRA). MRA menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integrasi sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2009: 203). Teknik ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh independen terhadap variabel dependen dengan dimoderasi oleh variabel pemoderasi.

Model teknik analisis tersebut dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka model analisis maka regresi penelitian adalah sebagai berikut:

$$ICSR_{it} = \beta_0 + \beta_1 ML_{it} + \beta_2 KOMIND + \beta_3 DIREK + \beta_4 AUDIT + \beta_5 ML * KOMIND_{it} + \beta_6 ML * DIREK_{it} + \beta_7 ML * AUDIT_{it} + \beta_8 SIZE_{it} + \beta_9 LEV_{it} + \epsilon_i$$

Keterangan:

$ICSR_{it}$: Indeks pengungkapan CSR perusahaan i tahun t

ML_{it} : Manajemen Laba perusahaan i tahun t

$KOMIND_{it}$: komisaris Independen

$DIREK_{it}$: Dewan direksi

$AUDIT_{it}$: Komite audit

$ML * KOMIND_{it}$: Menunjukkan interaksi antara manajemen laba dengan komisaris independen

$ML * DIREK_{it}$: Menunjukkan interaksi antara manajemen laba dengan dewan direksi perusahaan i tahun t

$ML * AUDIT_{it}$: Menunjukkan interaksi antara manajemen laba dengan komiteaudit perusahaan i tahun t

$SIZE_{it}$: Ukuran perusahaan perusahaan i tahun t

LEV_{it} : *Leverage* perusahaan i tahun t

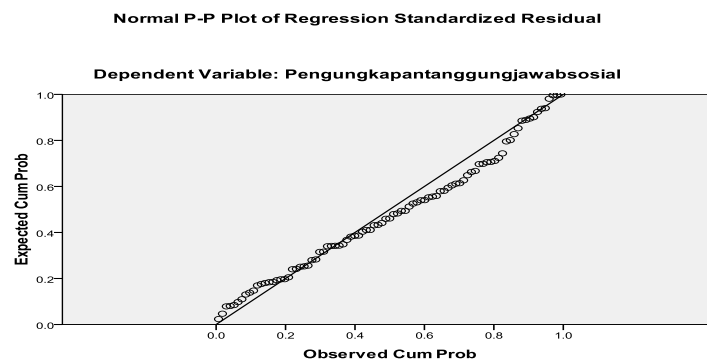
ϵ_{it} : *Error term*

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, nilai residual mempunyai distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Apakah ada data yang terletak jauh dari sebaran datanya maka data tersebut dikatakan tidak normal (tidak berdistribusi normal), dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.1

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi di antara perubah independen dari model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem multikolinieritas. Gujarati (1997:159-165) menyatakan bahwa apabila terjadi multikolinearitas, maka dapat mengakibatkan: nilai koefisien regresi kurang dapat dipercaya, akan mengalami kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing perubah independen terhadap perubah dependen. Deteksi adanya multikolinieritas adalah besaran VIF (*variance inflation factor*) dan *Tolerance*, sedangkan pedoman untuk mendeteksi model regresi bebas dari multikolinearitas adalah jika nilai VIF sekitar angka dan angka *Tolerance* mendekati 1.

Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Asumsi Multikolinearitas
Manajemen Laba	1,081	0,925	Tidak terjadi multikolinearitas
Komisaris independen	1,096	0,912	Tidak terjadi multikolinearitas
Dewan Direksi	1,059	0,945	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit	1,016	0,985	Tidak terjadi multikolinearitas
Size	1,155	0,866	Tidak terjadi multikolinearitas
Leverage	1,166	0,858	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas antar perubah independen dalam model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai problem autokorelasi. Pada tabel Durbin watson dengan jumlah observasi (n) sebanyak 90 dan peubah independen (k) sebanyak 6 peubah. Hasil pengujian dengan menggunakan statistik Durbin Watson disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Autokerelasi

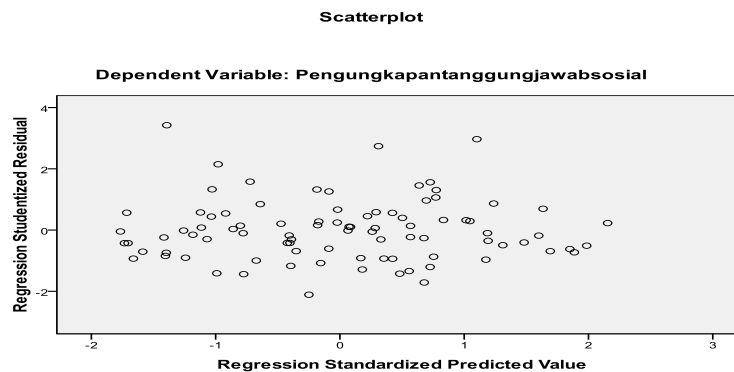
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,183 ^a	,034	-,037	,10623	1,696

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai uji Durbin Watson sebesar 1,696. Suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi dan tidak terjadi autokorelasi bila nilai uji Durbin Watson (DW) mendekati dua atau berada diantara $(du) < DW < (4-du)$ menghasilkan nilai $1,661 < 1,696 < (4-1,661)$ maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas nilai prediksi variabel dependen dengan nilai residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.2

Berdasarkan grafik scatterplot nampak bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

Uji ketepatan Model dan Koefisien Determinasi

Pengujian Ketepatan Model

Pengujian ketepatan dilakukan untuk memastikan bahwa model penelitian yang telah dirumuskan dapat diterapkan dalam penelitian ini. Uji model dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil uji F menunjukkan nilai F statistik sebesar 5,537 adalah signifikan dengan nilai p sebesar 0,000 (signifikan pada $\alpha=5\%$). Hal ini berarti bahwa semua variabel independen yang meliputi manajemen laba (ML), komisaris Independen (KOMIND), dewan direksi (DIREK), komite audit (AUDIT), ukuran perusahaan (SIZE), dan *leverage* (LEV) merupakan penjelas

yang signifikan terhadap variabel pengungkapan tanggung jawab sosial (ICSR). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengujian Koefisiensi Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar (dalam%) sumbangan faktor manajemen laba, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (ICSR). Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diketahui bahwa nilai R square adalah sebesar 0,450 atau 45%, sementara nilai Adjusted R Square adalah 0,405 atau 40,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dipengaruhi oleh keenam variabel independen yaitu: manajemen laba, komisaris Independen, dewan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* sebesar 40,5% sedangkan sisanya yaitu 59,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil Pengujian dan Pembahasan Hipotesis

Hasil pengujian bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan dimoderasi yaitu oleh *corporate governance* menggunakan analisis regresi moderasi yaitu dengan menggunakan uji statistik t. Hasil pengolahan data menggunakan program aplikasi SPSS 17.0 Windows dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	Nilai Statistik t	Nilai probabilitas
Manajemen Laba	0,328	0.164	1,997	0,049*
Komisaris Independen	0,132	,062	2,126	0,066
Dewan direksi	-0,014	0,007	-1.989	0,150
Komite audit	-0,039	0,018	-2,166	0,033*
Size	0,042	0,010	2,148	0,000*
Leverage	0,215	0,083	2,045	0,644
Interaksi manajemen laba dengan Komisaris Independen	0,573	0,268	2,135	0,086
Interaksi manajemen laba dengan Dewan direksi	0,090	0,040	2,249	0,127
Interaksi manajemen laba dengan Komite audit	0,276	0,139	1,994	0,049*

*)Signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$

Variabel Dependen: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (ICSR)

Analisis regresi moderasi ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel komisaris Independen (KOMIND), dewan direksi (DIREK), komite audit (AUDIT) bersifat moderasi pada hubungan manajemen laba (ML) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (ICSR). Variabel moderasi ML*KOMIND dihitung dari hasil kali nilai ML dengan variabel KOMIND. Variabel moderasi ML*DIREK dihitung dari hasil kali nilai ML dengan variabel DIREK. Variabel moderasi ML*AUDIT dihitung dari hasil kali nilai ML dengan skor *dummy* untuk variabel AUDIT.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengujian Hipotesis pertama menyatakan bahwa manajemen laba mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin tinggi tingkat manajemen laba dalam perusahaan, maka perusahaan cenderung untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas mengenai pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki nilai probabilitas sebesar 0,049 (signifikan secara statistik pada $\alpha=5\%$), dan nilai koefisien regresi sebesar 0,328. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif, yang berarti semakin tinggi manajemen laba akan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini dapat menerima hipotesis pertama.

Hasil ini konsisten dengan temuan Prior *et al.*, (2008) bahwa terdapat pengaruh positif dari praktik manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Manajer yang berperilaku oportunistik cenderung untuk berkolusi dengan *stakeholders* lainnya melalui implementasi dan pelaporan pengungkapan tanggung jawab sosial, sebagai strategi bertahan melawan inisiatif dari *stakeholders* yang dirugikan oleh praktik manajemen laba.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi.

Hipotesis kedua (a) menyatakan komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tabel 5.4 menunjukkan hasil regresi untuk melihat pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi. Hal ini terlihat dari besarnya nilai t untuk variabel komisaris independen sebesar 2,126 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,132 dengan signifikansi 0,066 (tidak signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$). Sedangkan variabel interaksi antara manajemen laba dengan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara manajemen laba dengan komisaris independen memiliki nilai t sebesar 2,135, nilai koefisien regresi 0,573 dan nilai probabilitas sebesar 0,086 (tidak signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$). Jadi hipotesis kedua (a) ditolak.

Variabel ML*KOMIND yang merupakan interaksi antara manajemen laba dengan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini menarik karena meskipun secara parsial komisaris independen

mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba sejalan dengan hasil Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan.

Hal ini berarti seberapa pun besarnya komposisi komisaris independen, tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi komisaris independen tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Komposisi dan struktur dewan merupakan hal penting sebagai mekanisme *corporate governance*.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Dewan Direksi sebagai Variabel Pemoderasi.

Hipotesis kedua (b) menyatakan dewan direksi memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tabel 5.4 menunjukkan hasil regresi untuk melihat pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi. Hal ini terlihat dari besarnya nilai t untuk variabel dewan direksi sebesar -1,989 dan nilai koefisien regresi sebesar -0,14 dengan signifikansi 0,150 (tidak signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$). Sedangkan variabel interaksi antara manajemen laba dengan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara manajemen laba dengan dewan direksi memiliki nilai t sebesar 2,249, nilai koefisien regresi 0.090 dan nilai probabilitas sebesar 0,127 (tidak signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$). Jadi hipotesis kedua (b) ditolak.

Variabel ML*DIREK yang merupakan interaksi antara manajemen laba dengan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini menarik karena meskipun secara parsial dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba sejalan dengan hasil Iqbal dan Fachiyah (2007) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran atau semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin tinggi manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual*. Ini berarti ukuran dewan direksi yang kecil akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi monitoringnya atas laporan keuangan sehingga mengurangi kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba. Namun hasil interaksi antara dewan direksi dengan manajemen laba ternyata tidak

signifikan berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Jadi dewan direksi tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mengindikasikan keberadaan dewan direksi sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* belum dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan direksi yang besar tidak berperan dalam melakukan mekanisme monitoring, ukuran dewan direksi yang lebih sedikit akan mengarah pada mekanisme monitoring yang lebih sehingga *corporate governance* dapat lebih ditingkatkan.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi.

Hipotesis kedua (c) komite audit memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tabel 5.4 menunjukkan hasil regresi untuk melihat pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi. Hal ini terlihat dari besarnya nilai t untuk variabel komite audit sebesar -2,166 dan nilai koefisien regresi -0,039 sebesar dengan signifikansi 0,033 (signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$). Sedangkan variabel interaksi antara manajemen laba dengan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel interaksi antara manajemen laba dengan komite audit memiliki nilai t sebesar 1,994, nilai koefisien regresi 0,276 dan nilai probabilitas sebesar 0,049 (signifikan secara statistik pada level $\alpha=5\%$). Jadi hipotesis kedua (c) diterima.

Variabel ML*AUDIT yang merupakan interaksi antara manajemen laba dengan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil interaksi antara komite audit dengan manajemen laba ternyata signifikan berpengaruh terhadap hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Jadi komite audit terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini mendukung penelitian Rodgers *et al.*, (2007) bahwa peran komite audit berdampak pada tindakan *corporate* dalam mempengaruhi akuntabilitas dari strategi dan implementasi pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hasil pengujian dan pembahasan variabel kontrol

Ukuran Perusahaan (Size)

Berdasarkan hasil pengujian terdapat pengaruh yang signifikan positif secara statistik antara ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini terbukti dari hasil uji regresi seperti yang dapat dilihat pada tabel 5.4 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar 0,000 (signifikan pada $\alpha=5\%$), nilai t sebesar 2,148 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,042 (positif). Hasil ini mengindikasikan mempunyai hubungan yang positif semakin besar perusahaan, semakin kompleks operasionalnya akan mengakibatkan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hasil ini memperkuat temuan Brammer dan Pavellin (2006) bahwa perusahaan besar cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan dalam saluran komunikasi formal seperti laporan tahunan sebagai upaya untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Leverage

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5.4 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas ukuran perusahaan sebesar 0,644 (tidak signifikan pada $\alpha=5\%$), nilai t sebesar 2,045 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,215. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini mendukung Brammer dan Pavelin (2006) bahwa perusahaan yang mempunyai jumlah hutang yang lebih rendah cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa manajemen laba signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Prior *et al.*, (2008) bahwa terdapat pengaruh positif dari praktik manajemen laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini memberikan dukungan teori bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari strategi bertahan bagi perilaku opportunistik manajerial untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholders*.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa interaksi antara manajemen laba dengan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris independen tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini berarti seberapa pun

besarnya komposisi komisaris independen, tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara manajemen laba dengan dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan direksi tidak terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi sebagai bagian dari praktik *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mengindikasikan keberadaan dewan direksi sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* belum dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Interaksi antara manajemen laba dengan komite audit dalam penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi komite audit terbukti dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini juga berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan positif antara luas pengungkapan perusahaan dengan ukuran perusahaan. Hasil ini juga memperkuat temuan Brammer dan Pavellin (2006) bahwa perusahaan besar cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan dalam saluran komunikasi formal seperti laporan tahunan sebagai upaya untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Leverage sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini mendukung Brammer dan Pavelin (2006) bahwa perusahaan yang mempunyai jumlah hutang yang lebih rendah cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah akan mendapatkan tekanan yang lebih rendah dari kreditor, sehingga dengan mudah meningkatkan perolehan dana serta lebih bebas untuk menentukan fokus dalam aktivitas perusahaan, seperti pengungkapan sukarela yang secara langsung berhubungan dengan keberhasilan keuangan perusahaan Brammer dan Pavelin (2006).

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang nantinya dapat memberikan arah bagi penelitian selanjutnya, adalah sebagai berikut:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 2 tahun pengamatan dan dilakukan hanya pada perusahaan publik di Indonesia menurut indeks Kompas 100, sehingga

sampel yang digunakan dalam penelitian ini relatif masih sedikit, dan hasil penelitiannya hanya dapat untuk generalisasi perusahaan yang termasuk publik di Indonesia menurut indeks Kompas 100 saja.

2. Penelitian ini menggunakan GRI sebagai indikator dalam menilai pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Penafsiran yang subjektif dimungkinkan terjadi saat memberikan penilaian item-item tertentu yang diungkapkan oleh perusahaan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan *Jones modified model* untuk menghitung *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba. Untuk menilai sensitivitas hubungan antara manajemen laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, diperlukan pengujian secara lebih terinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Ballou, B., L. Heitger dan C.E. Landes. 2006. The future of corporate sustainability reporting: a rapidly growing assurance opportunity. *Journal accountancy* December: 65-74
- Brammer, S., S. Pavelin. 2006. Voluntary environmental disclosure by large UK companies. *Journal of Bussiness Finance & Accounting*, Volume.33 (7&8): 1168-1188
- Castelo, M., L Lima. 2006. Corporate social responsibility and resources-based perspective, *Journal of Bussiness Ethics* 69:111-32
- Chih, H., C. Shen, dan F. Kang. (2008). Corporate social responsibility, investor protection, and earning management: some international evidence, *Journal of Bussiness Ethics*: 79: 179-198
- Dechow, P.M., R. G. Sloan, dan A.P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*. 70: 193-225
- Elkington, J. 1994. Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainability. *California Management Review*: Winter 1994; 36(2): 90
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid II. Edisi Kedua. FCGI. Jakarta
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan Program SPSS, Edisi Keempat, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, D. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan: Zumarno Zain. Cetakan Kelima. Erlangga. Jakarta.
- Haniffa, R.M. dan T.E. Cooke. 2002. Culture, Corporate governance dan disclosure in Malaysian corporation, *Abacus* 38 (3): 317-349
- Healy, Paul, dan James M. Wahlen. 1998. A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications For Standard Setting. *Working Paper*.
- Jamail, D., A.M. Safieddine dan M Rabbath. 2008. Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Sinergesis and Interrelationship. *Corporate Governance: An International Review Volume*. 16 (5): 443-459
- Leuz, C., Nanda, D dan Wysocki, P. 2003. Earning management and investors protection: An international comparison. *journal og financial Economics*. 69: 505-527.
- Mardiyah, A. A. 2006.*Teori Akuntansi: Konsep dan Empiris*. Edisi 2,. BP STIE Malangkuçęwara Malang.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*. 2004. OECD Principles of Corporate of Corporate Governance. OECD publication service.

- Prior, D., J. Surroca dan J.A Tribo. 2008. Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship beetwen earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance: An international Review* 16 (3): 443-459
- Rodgers, R. F dan L. Mahoney. 2004. Stakeholder conception of the corporation: their meaning and influence in accounting research, *Business Ethics Quarterly* 14 (3): 391-431
- Schipper, K. 1989. Commentary on earnings management. *Accounting Horizons*. Desember, 9—102.
- Scott, W.R. 2009.*Financial Accounting Theory*, Third Edition, Prentice Hall, Toronto
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2003. Kinerja Keuangan, *Political Visibility*, Ketergantungan Pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*
- Sulastini, R. 2007. pengaruh karakteristik perusahaan terhadap Social disclosure perusahaan manufaktur yang telah go public. *Skripsi. Semarang: Universitas negeri Semarang*.
- Sutrisno. 2000.*Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Ekonisia, Yogyakarta.
- Wardhani, R. 2007. Mekanisme corporate governance dalam perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan, *jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia* 4: 95-114
- Weston, J. F. dan Copeland, T. E. 1995, *Manajemen Keuangan*. Jilid 1. Edisi Kesembilan. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Zahra, S.A., R.L Priem dan A.A. Resheed. 2005. The antecedents and consequences of the top management fraud. *journal of management* 31: 803-828.